**JUDUL**

**PROFIL**

**ISI KONTEN**

1. **PENDAHULUAN**

Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang berisi tentang komitmen pimpinan atas pengakuan keberadaan dan berfungsinya Satuan Pengawasan Internal (SPI) di sebuah organisasi atau badan hukum. Piagam Pengawasan Intern disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK RI) Nomor. 129/PMK.05/2020 sebagaimana terakhir diubah melalui PMK RI Nomor. 202/PMK.05/2022 tentang pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

Piagam Pengawasan Intern akan menjadi dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan oleh SPI agar diketahui oleh pegawai dan pihak lain yang terkait. Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan di Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) yang sesuai dengan kaidah-kaidah *Good and Clean Governance* (GCG) yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan pertanggunganjawaban, serta kewajaran (*fairness*) sesuai dengan prinsip institusi yang sehat dan taat kepada Peraturan Perundang-undangan. Keberadaan Piagam Pengawasan Intern bertujuan untuk memberikan pengakuan (*recognition*) kepada SPI atas segala tugas pokok dan fungsinya di Polsri guna tercapainya rasa saling pengertian dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Polsri.

1. **VISI DAN MISI SPI**
2. Visi SPI

Berikut visi SPI Polsri.

*Menjadi SPI yang independen, objektif dan berintegritas dalam mengawal terciptanya Good and Clean Governance (GCG) di Politeknik Negeri Sriwijaya yang Unggul dan Terkemuka.*

1. Misi SPI

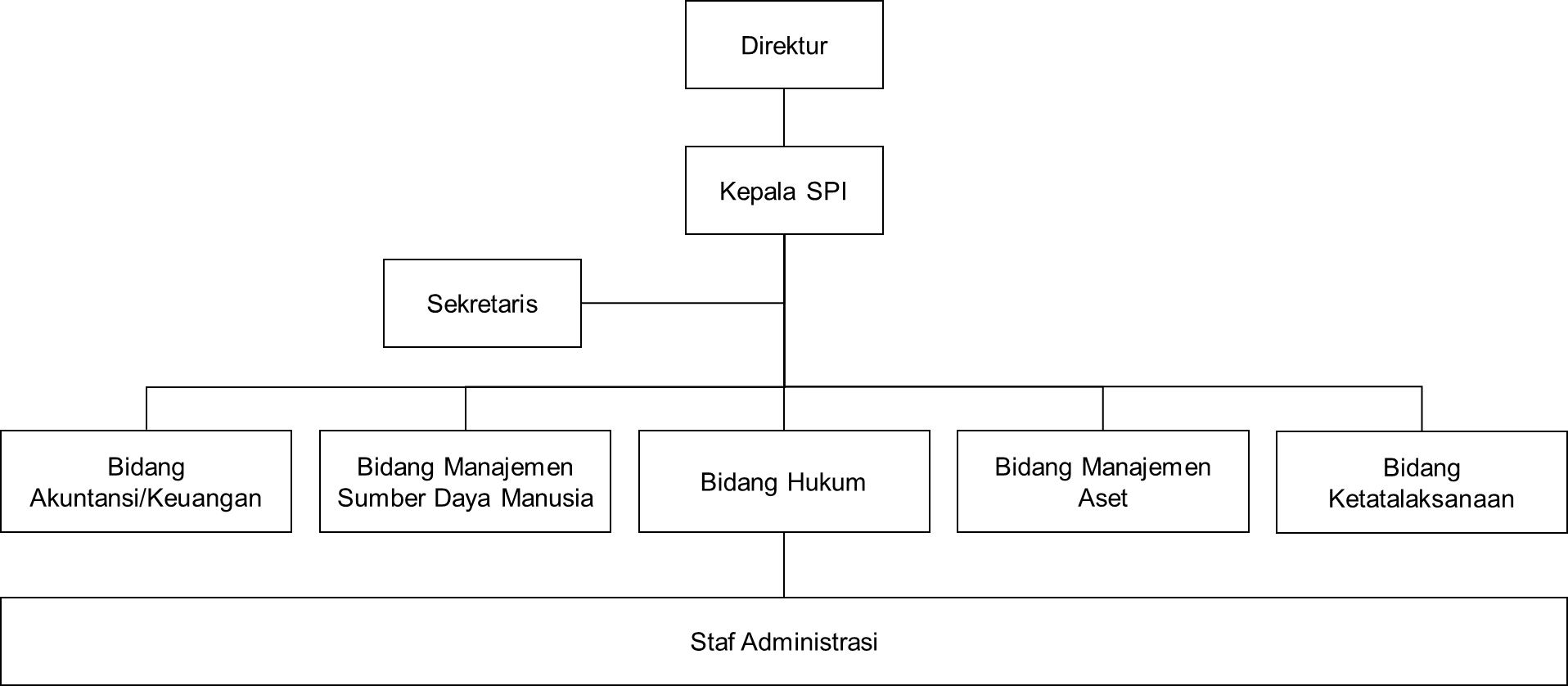
Berikut misi SPI Polsri.

1. Mendorong implementasi *Good and Clean Governance* (GCG) pada setiap unit kerja di Polsri melalui pengawasan yang berkesinambungan dan profesional;
2. Menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan objektif dengan melaksanakan pengawasan dan evaluasi yang bebas dari intervensi, serta memberikan rekomendasi yang objektif untuk perbaikan proses manajemen dan tata kelola;
3. Mengembangkan kompetensi dan menjaga integritas SPI untuk memastikan pelaksanaan pengawasan yang terpercaya dan berkualitas;
4. Mendukung dan memastikan akuntabilitas dan transparansi di setiap proses kegiatan Polsri melalui sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif;
5. Mengintegrasikan teknologi dan pendekatan terkini dalam audit berbasis risiko untuk menciptakan proses pengawasan yang efisien, efektif, dan ekonomis;
6. Memberikan masukan strategis kepada manajemen terkait mitigasi risiko dan pengambilan keputusan yang mendukung tercapainya visi Polsri sebagai institusi yang unggul dan terkemuka.
7. **STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SPI**
8. Kedudukan SPI

SPI sebagai pelaku tugas di bidang pengawasan internal institusi berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Semua jajaran di lingkungan Polsri dan unit kerja lainnya berkewajiban untuk bekerjasama dengan SPI sehingga memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab audit.

SPI dipimpin oleh Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas. Dalam menjalankan aktivitasnya, Kepala SPI dibantu oleh Auditor Intern dan Staf Administrasi. Kepala SPI bertanggung jawab kepada Direktur, sedangkan Auditor Intern dan Staf Administrasi bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI.

Berikut struktur organisasi SPI Polsri.



Gambar 1. Struktur Organisasi SPI Politeknik Negeri Sriwijaya

1. Fungsi SPI

SPI merupakan organisasi yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur.

1. Ruang Lingkup Pengawasan SPI

Ruang lingkup pengawasan SPI diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh SPI kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, peran dan layanan SPI diberikan dalam bentuk asurans dan jasa konsultansi.

Asurans adalah pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian yang berkegiatan mencakup audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan/*monitoring*. Adapun jasa konsultansi adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lainnya yang dibutuhkan klien yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati dan ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern. Contohnya sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

Berikut gambar lingkup pengawasan SPI untuk asurans dan jasa konsultansi.

Gambar 2. Ruang Lingkup Pengawasan SPI

1. **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SPI**

Berikut tugas dan tanggung jawab SPI dalam menjalankan fungsi pengawasan non-akademik.

1. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur dan Dewan Pengawas;
6. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
7. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Aparat Pemeriksaan Ekstern Pemerintah, dan Pembina BLU;
8. Melakukan reviu laporan keuangan;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
10. Menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI; dan
11. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­undangan.
12. **WEWENANG SPI**

Berikut wewenang SPI.

1. Mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset BLU pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU dan/atau Dewan Pengawas;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan BLU dan/atau Dewan Pengawas;
4. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan/ atau Aparat Pemeriksaan Ekstern Pemerintah; dan
5. Mendampingi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan/atau Aparat Pemeriksaan Ekstern Pemerintah dalam melakukan pengawasan.
6. **KODE ETIK AUDITOR INTERNAL SPI**

Kode Etik Auditor Internal mengacu kepada kode etik yang diterbitkan oleh IIA (*The Institute of Internal Auditors*) yang telah disesuaikan dan dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kebutuhan institusi dalam pengelolaan dan pengawasan meliputi:

A. Integritas (*Integrity*)

1. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap Polsri atau terhadap pihak yang dilayani. Namun, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang (aktivitas illegal) atau melanggar hukum.
3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan Polsri.

## B. Objektivitas (*Objectivity*)

1. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Polsri atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif.
2. Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari pegawai, klien, pelanggan, pemasok ataupun mitra bisnis Polsri yang dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
3. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
4. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal (SPAI).

## C. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

1. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia sebagai berikut: (1) untuk mendapatkan keuntungan pribadi; (2) secara sah melanggar hukum; atau (3) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Polsri.
2. Kecuali dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perusahaan, auditor internal harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
3. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika diungkapkan dapat: (1) mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu; atau (2) menutupi adanya praktik- praktik yang melanggar hukum.

## D. Kompetensi (*Competency*)

Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan professional berkelanjutan.

1. **PERSYARATAN AUDITOR INTERN SATUAN PENGAWAS**

Berikut persyaratan sebagai Kepala SPI dan Auditor Intern.

* 1. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi oleh Auditor Intern SPI.
  2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
  3. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai teknis audit dan/atau disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
  4. memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan di bidang peraturan pengelolaan keuangan BLU dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya;
  5. memiliki kecakapan untuk berinterakasi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
  6. bersedia mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi pengawasan intern;
  7. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data BLU terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
  8. memahami prinsip tata kelola yang baik dan manajemen risiko; dan
  9. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.
  10. Khusus untuk Kepala SPI harus memiliki keahlian yang memadai mengenai audit.

Keahlian dimaksud merupakan keahlian yang diakui dalam profesi auditor intern dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang sesuai. Dalam hal sertifikasi profesi belum dapat dipenuhi, berikut persyaratan yang dapat menggantikan hal tersebut.

a. memiliki pengalaman sebagai auditor paling singkat 3 (tiga) tahun; dan/atau

b. memiliki pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan.

Kepala SPI yang diangkat dengan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas harus memperoleh sertifikasi profesi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat. Apabila jangka waktu terlampaui dan persyaratan tidak terpenuhi, Kepala SPI diberhentikan dari jabatannya.

1. **PERTANGGUNGJAWABAN SPI**

Berikut adalah hal-hal yang menjadi pertanggungjawaban SPI.

1. SPI menyusun Rencana Program Kerja Pengawasan Intern dan menyampaikannya kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan. Rencana Program Kerja Tahunan Pengawasan Intern dapat dikecualikan untuk pengawasan yang tidak terjadwal dan/atau dirahasiakan;
2. SPI melaksanakan pengawasan berdasarkan Rencana Program Kerja Tahunan Pengawasan Intern yang telah disetujui oleh Direktur;
3. SPI menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur dan Dewan Pengawas;
4. SPI secara efisien dan efektif melaksanakan pemantauan dan mendorong tidak lanjut rekomendasi pengawasan SPI, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Aparat Pemeriksaan Ekstern Pemerintah, dan Pembina BLU;
5. SPI melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direktur dan Dewan Pengawas yang paling sedikit memuat:
   1. permasalahan yang menjadi temuan dan rekomendasi;
   2. target waktu penyelesaian; dan
   3. status penyelesaian.
6. **LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS**

Kepala SPI dan Auditor Intern SPI dilarang merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional BLU, termasuk kegiatan yang terkait dengan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), kecuali tugas dan jabatan pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko.

1. **PENUTUP**

Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) disusun oleh SPI dan ditetapkan oleh Direktur Polsri atas persetujuan Dewan Pengawas yang digunakan sebagai acuan kerja SPI dan menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan dan Pegawai Polsri untuk menunjukkan kerja sama dengan SPI untuk mewujudkan butir-butir yang termuat dalam Piagam Pengawasan Intern ini.

Piagam Pengawasan Intern ini berlaku efektif sejak ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi serta penyempurnaan secara berkala sesuai dengan kebutuhan Polsri.

Palembang, Oktober 2025

Disusun oleh SPI Ditetapkan Oleh

Kepala SPI, Direktur,

**Edwin Frymaruwah, S.E., M.Ak. Ir. Irawan Rusnadi, M.T.**

NIP. 199103012019031015 NIP.196702021994031004

Disetujui oleh Dewan Pengawas

Ketua,

**Subiyantoro, S.H., M.Si.**

NIP. 196611081992031001